

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dana yang besar seringkali menjadi patokan oleh sebagian masyarakat untuk mencapai keberhasilan usaha. Makin besar dana yang tersedia membuat kemungkinan dalam keberhasilan usaha semakin terbuka lebar, baik di bidang produksi dalam ekonomi riil maupun dalam perdagangan, karena pemodal besar biasanya menang dalam persaingan di pasar.

Rosenberg (dalam Gunarto Suhardi, 2006: 5) mengatakan bahwa : “Dana yang mencukupi biasanya dianggap tersedia dalam sistem perbankan karena dalam sistem perbankan terkumpul dana masyarakat berbentuk rekening giro, tabungan dan bentuk simpanan lainnya yang harus dikelola bank.” Memang fungsi utama perbankan adalah sebagai perantara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Sumber-sumber dana dapat diperoleh dari modal sendiri dan dari pihak lain.

Sumber dana yang bersumber dari bank merupakan sumber dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. Secara garis besar, pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari : setoran modal dari pemegang saham, cadangan – cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Kerugian dari sumber dana ini adalah memerlukan waktu yang relatif lebih lama dalam memperoleh dana dalam jumlah besar karena untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah (Kasmir, 2002: 63).

Dana yang bersumber dari pihak lain ada yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga lain yang biasa disebut dana pihak kedua. Sumber dana ini berasal dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga lain kepada pihak bank, dan merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana lain. Kerugian sumber dana ini yaitu dalam pencariannya yang relatif lebih mahal serta hanya bersifat sementara saja (Kasmir, 2002: 65).

Sumber dana yang ketiga berasal dari masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan dana dari masyarakat yang disebut juga Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham serta pinjaman dari lembaga lain. Hal ini dikarenakan sumber dana pihak ketiga tersedia banyak di masyarakat dan cara untuk mendapatkannya tidak sesulit dan semahal seperti dana pihak kesatu dan dana pihak kedua.

Kasmir (2002: 64) menyatakan bahwa : “Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.” Oleh karena itu, sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kasmir (2002: 65) menyatakan : “Secara umum kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luas dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu : Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Simpanan Deposito (*Time Deposit*).”

Di bawah ini merupakan data perkembangan perolehan simpanan DPK menurut catatan Bank Indonesia (BI) selama tahun 2002 – 2006 :

Tabel 1.1
Perkembangan Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Tahun 2002 – 2006
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK)			Total DPK
	Giro	Tabungan	Deposito	
2002	204,067	193,468	447,480	845,015
2003	224,759	244,439	433,127	902,325
2004	247,142	296,647	421,290	965,079
2005	282,654	281,757	569,675	1.134,086
2006	339,785	334,380	624,590	1.298,755

(Sumber : Bank Indonesia, 2007)

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2002 – 2006 terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 169,007 triliun atau pertumbuhannya naik menjadi 17,51% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 6,95%.

Menurut Dirut Bank Niaga Peter B Stok, kenaikan posisi DPK terjadi karena perbankan semakin kreatif meluncurkan produk, terutama tabungan dan giro. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan tabungan dan giro meskipun kecil dibandingkan dengan deposito berjangka yang mengalami penurunan dari tahun 2002 – 2004. Bank lebih menggenjot produk tabungan dan giro karena keduanya termasuk jenis dana murah, dalam artian bunga yang harus dibayar ke nasabah lebih rendah dibandingkan dengan deposito. Dengan porsi dana murah yang semakin banyak, pendapatan bunga bersih bank akan meningkat.

Dalam upaya mempertahankan usaha, pihak bank harus dapat meningkatkan kinerjanya. Sesuai dengan usaha utamanya, maka upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam memperoleh laba adalah melalui penyaluran kredit kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan ekspansi kredit yang merupakan kegiatan utama suatu bank. Hal ini juga untuk menutupi biaya-biaya lain serta untuk membayar imbal jasa berupa bunga kepada para deposan.

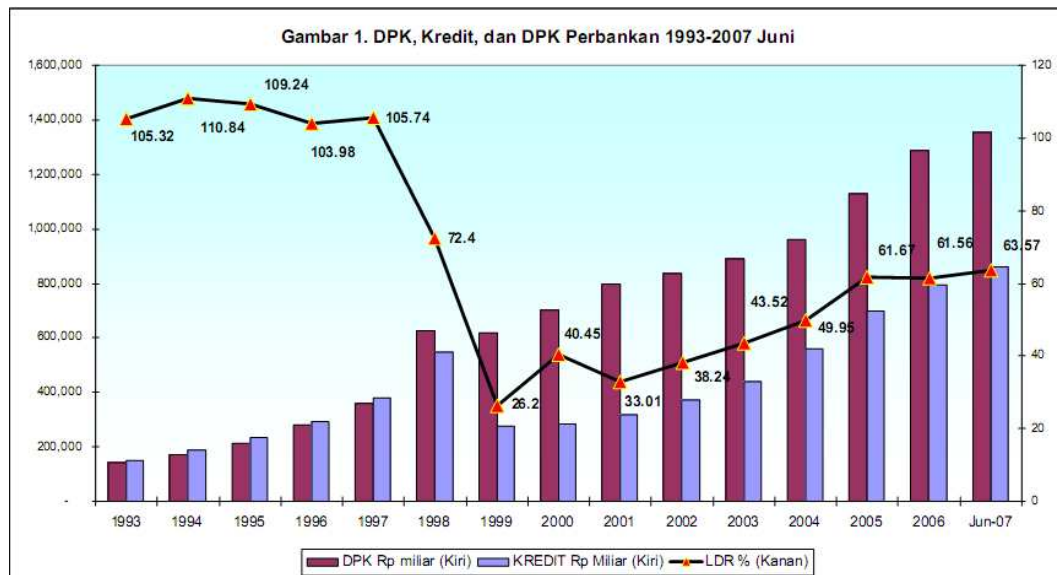
Dahlan Siamat (2001: 132) mengemukakan bahwa :

Penggunaan dana bank salah satunya adalah untuk pemberian kredit atau *loan* kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan usaha bank berasal dari kegiatan usaha ini yang akan meningkatkan perolehan laba bank.

Seiring dengan kondisi ekonomi sekarang, peranan perbankan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 silam. Hal ini dimungkinkan karena kondisi sistem perbankan yang relatif stabil pada tahun 2004. Berdasarkan data dari Bank Indonesia bulan Oktober tahun 2004, indikator – indikator perbankan menunjukkan perbaikan antara lain ditunjukkan dari aspek permodalan, kualitas kredit, tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha bank. Jumlah kredit yang disalurkan perbankan terus meningkat dan telah mencapai Rp 567,3 triliun atau meningkat 2,2% dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Dengan demikian, selama tahun 2004 pemberian kredit perbankan telah meningkat Rp 90,1 triliun.

Berikut ini data perkembangan DPK, dan kredit perbankan dari tahun 1993 sampai dengan Juni 2007 serta LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dengan rumus

perhitungan rasio antara jumlah kredit yang disalurkan bank dibagi dengan jumlah DPK :



Sumber : www.bi.go.id, diolah

Sejak terjadinya krisis perbankan dan dilanjutkan dengan proses rekapitalisasi perbankan tahun 1999 dimana kredit perbankan sekitar Rp 300 triliun dialihkan ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), maka LDR perbankan langsung merosot drastis karena jumlah kredit berkurang sedangkan jumlah DPK tidak berubah. LDR adalah rasio yang pada awalnya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, dalam arti apabila LDR di atas 110% berarti likuiditas bank kurang baik karena jumlah DPK tidak mampu menutup kredit yang disalurkan. Begitu rendahnya LDR paska rekapitalisasi 1999-2000, akhirnya LDR berubah fungsi dan lebih sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam menyalurkan kredit (fungsi intermediasi). (Djoko Retnadi, Koran Seputar Indonesia, Senin 27 Agustus 2007)

Di masa sekarang ini, seperti yang dilansir dalam siaran pers Bank Indonesia, segmen pasar yang kini menjadi primadona bagi kredit perbankan adalah segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan segmen pasar konsumen. Berdasarkan data statistik ekonomi keuangan dari BI sejak tahun 2002 sampai dengan akhir 2006, pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) bank umum didominasi oleh jenis penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan total penyalurannya yaitu sebesar Rp 267,883 triliun atau mencapai 60,12% dari total penyaluran kredit jika dibandingkan dengan Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumtif (KS) yang hanya berjumlah Rp 78,377 triliun dan Rp 99,303 triliun.

Di bawah ini merupakan data perkembangan KMK yang disalurkan untuk kredit usaha kecil menurut catatan BI selama tahun 2002 – 2006 :

Tabel 1.2
Perkembangan Kredit Modal Kerja (KMK)
Penyaluran untuk Kredit Usaha Kecil (KUK)
Tahun 2002 – 2006
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Kredit Modal Kerja
2002	32,954
2003	39,514
2004	55,444
2005	64,242
2006	75,729

(Sumber : Bank Indonesia, 2007)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa KMK di Indonesia untuk KUK dari tahun 2002 sampai dengan 2006 terus mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 15,930 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 40,31% .

Menurut Direktur Kredit Bank Jabar, Abas Somantri, penyaluran kredit bagi UMKM akan lebih menjadi perhatian utama dimasa depan. Mengingat potensi UMKM di Jabar selama ini sangat besar. Dari sisi kuantitas saja misalnya, saat ini sudah terdapat 7 juta pelaku UMKM di Jabar.

Berdasarkan data BI tahun 2007, penyaluran KMK didominasi Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu Rp 123,238 triliun. Sedangkan Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah (BPD), serta Bank Asing dan Bank Campuran hanya menyalurkan KMK kurang dari Rp 60 triliun akhir periode tahun 2006.

Di bawah ini merupakan data persetujuan kredit Bank Umum menurut kelompok bank untuk pemberian KMK tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 :

Tabel 1.3
Perkembangan Kredit Modal Kerja (KMK)
Menurut Kelompok Bank
Tahun 2002 – 2006
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Kelompok Bank				Total KMK
	Bank Persero	BPD	BUSN	Bank Asing	
2002	30,629	5,398	48,741	4,529	89,297
2003	32,965	7,284	53,966	5,703	99,918
2004	34,259	7,832	65,773	10,023	117,887
2005	36,126	8,984	109,418	2,186	156,714
2006	50,593	11,533	123,238	28,747	214,111

(Sumber : Bank Indonesia, 2007)

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa Bank Persero menyalurkan KMK sebesar Rp 50,593 triliun, sementara BPD dan Bank Asing hanya menyalurkan sebesar Rp 11,533 triliun dan Rp 28,747 triliun. Penyaluran KMK terbesar disalurkan oleh BUSN, yaitu Rp 123,238 triliun pada tahun 2006 dan angka tersebut merupakan jumlah tertinggi yang disalurkan dari tahun 2002.

Hubungan Simpanan DPK dengan jumlah kredit yang disalurkan sebenarnya sudah dapat diketahui dari definisi bank. Berikut ini penulis menjabarkan beberapa definisi dari bank menurut Undang – Undang RI No.10 1998 dan menurut Kasmir. Menurut Undang – Undang RI No.10 1998 tentang perbankan, bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Sementara Kasmir (2002:3) mendefinisikan bahwa bank sebagai berikut :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank berfungsi sebagai penerima dana, artinya bank menerima uang serta dana – dana lainnya dari masyarakat yang dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito.

Peningkatan simpanan DPK, seringkali tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. Berikut disajikan perbandingan perubahan Simpanan DPK dengan pemberian KMK untuk KUK di Indonesia :

Tabel 1.4
Perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan
Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Kredit Usaha Kecil (KUK)
Tahun 2002 – 2006
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	DPK	Perkembangan		KMK	Perkembangan		LDR
		Nominal	Rasio		Nominal	Rasio	
2002	845,015	-	-	32,954	-	-	
2003	902,325	57,310	6.78%	39,514	6,560	19.91%	294%
2004	965,079	62,754	6.95%	55,444	15,930	40.31%	580%
2005	1.134,086	169,007	17.51%	64,242	8,798	15.87%	91%
2006	1.298,755	164,669	14.52%	75,729	11,487	17.88%	123%

Sumber : Bank Indonesia, 2007 (diolah kembali)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Simpanan DPK mengalami peningkatan rasio pertumbuhan menjadi 17,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 6,95%. Sedangkan pemberian KMK justru mengalami penurunan rasio pertumbuhan menjadi 15,87%. Angka ini turun sebanyak 24,44% dibandingkan tahun sebelumnya yang naik sampai 20,4%. Peristiwa diatas berbanding terbalik dengan tahun 2006, Simpanan DPK mengalami penurunan menjadi 14,52%, tetapi pemberian KMK justru mengalami peningkatan menjadi 17,88%.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 7), yaitu :

Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk – produk / jasa – jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Produk atau jasa – jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

Sedangkan manfaat kredit bagi masyarakat luas menurut Rachmat F. dan Maya A. (2004: 9), yaitu :

Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.

Berdasarkan dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah simpanan DPK pada bank akan meningkatkan pemberian kredit kepada masyarakat, salah satunya untuk KMK. Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Merindawati (2006) pada Bank Jabar menunjukkan bahwa simpanan DPK

berpengaruh secara signifikan terhadap laba operasional. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ricky Bayu Wijaya (2007) pada Bank Jabar menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan simpanan DPK dengan pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel dependennya, bila penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rinda M. menggunakan laba operasional, dan Ricky B. W menggunakan penyaluran kredit secara umum dan tidak dijelaskan secara spesifik kredit jenis apa yang disalurkan, maka pada penelitian ini variabel dependennya adalah total pemberian KMK kepada masyarakat (pihak ketiga) yang berhasil disalurkan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan DPK dengan pemberian KMK yang disalurkan oleh Bank Umum *go public*, dimana penelitian ini akan disajikan dalam judul : **“HUBUNGAN SIMPANAN DANA PIHAK KETIGA DENGAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK UMUM GO PUBLIC”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk mengetahui bagaimana hubungan Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Umum *go public* perlu dirumuskan permasalahannya terlebih dahulu.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Simpanan DPK pada Bank Umum *go public*
- 2) Bagaimana pemberian KMK pada Bank Umum *go public*
- 3) Bagaimana hubungan Simpanan DPK dengan pemberian KMK pada Bank Umum *go public*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai hubungan Simpanan DPK dengan pemberian KMK pada Bank Umum *go public*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui gambaran Simpanan DPK pada Bank Umum *go public*
- 2) Mengetahui gambaran pemberian KMK pada Bank Umum *go public*
- 3) Mengetahui bagaimana hubungan Simpanan DPK dengan pemberian KMK pada Bank Umum *go public*

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak – pihak lain yang berkepentingan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Simpanan DPK dan pemberian KMK pada bank umum *go public*.
- 2) Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan simpanan DPK dengan pemberian KMK, serta sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan serta menaruh minat terhadap permasalahan yang sedang dibahas sebagai suatu pengetahuan.
- 2) Sebagai masukan bagi dunia perbankan untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan pengumpulan simpanan DPK dan juga peningkatan penyaluran kredit.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, Kasmir (2004: 1) mendefinisikan bank sebagai berikut:

“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa.”

Kemudian menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 definisi bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kegiatan penyaluran kredit yang biasa disebut dengan ekspansi kredit dilakukan pihak perbankan adalah untuk membantu pihak – pihak yang membutuhkan dana. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan bank memiliki beban yang besar dalam kewajiban mengembalikan bunga kepada deposan, ditambah lagi biaya operasional lainnya karena apabila hal ini terjadi maka bank tidak akan memperoleh keuntungan.

Undang – undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara umum Triandaru dan Budisantoso (2007: 117), membedakan kredit atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitur menjadi :

a) Kredit Investasi (KI)

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.

b) Kredit Konsumtif (KK)

Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

c) Kredit Modal Kerja (KMK).

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.

Di masa sekarang ini, segmen pasar yang kini menjadi primadona bagi kredit perbankan adalah segmen UMKM. Secara umum, KUK menurut Sigit Triandaru (2006: 50) adalah : “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif.” Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam memberikan barang dan jasa. Kredit tersebut dapat berupa Kredit Investasi (KI) maupun KMK. Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah penyaluran kredit usaha kecil bank umum menurut jenis penggunaan menunjukkan bahwa KMK merupakan kredit yang paling besar penyalurannya yaitu sebesar Rp 69,173 milyar dibandingkan dengan KI dan Kredit Konsumtif (KS) yang hanya berjumlah Rp 17,622 milyar dan Rp 15,233 milyar pada akhir periode tahun 2006.

Penyaluran dana untuk kredit berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (Ade Arthesa, 2006:76) adalah sebagai berikut :

Penggunaan dana untuk kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Alokasi aktiva produktif pada bank tertentu umumnya didominasi oleh pemberian kredit. Hal ini terjadi karena bank mendapatkan penerimaan yang tinggi dari kredit. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh perbankan berasal dari masyarakat.

Kasmir (2002: 64) menyatakan bahwa : “Sumber dana dari masyarakat luas dibagi ke dalam tiga jenis yaitu Giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang disebut juga sebagai sumber dana pihak ketiga.”

Triandaru dan Budisantoso (2006: 97) mengungkapkan bahwa :

- a) Giro (*Demand Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
- b) Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- c) Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposit.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dengan cara menghimpun dana dari masyarakat melalui giro, tabungan dan deposito yang disebut simpanan dana pihak ketiga. Kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Hubungan antara simpanan dana pihak ketiga dengan jumlah kredit yang disalurkan pada dasarnya sudah dapat dilihat pada definisi bank itu sendiri. Menurut Undang-Undang RI Tahun No.7 1992 tentang perbankan, serta menurut Kasmir (2002:3) mendefinisikan bahwa bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Dendawijaya (2005: 23) mengemukakan : “Penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, komisi, *commitment fee*, *apprisial fee*, *superfision fee*, dan lain – lain yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank.” Sumber dana terbesar yang dipergunakan bagi kelangsungan operasional bank berasal dari dana masyarakat. Sumber dana bank yang berasal dari dana masyarakat mencapai 80% - 90% dari total dana yang tersedia, sehingga bank disebut sebagai “lembaga kepercayaan”. Jadi sudah sewajarnya, bank menyalurkan kredit kepada masyarakat sebagai balas jasa karena telah mempercayakan dana mereka kepada pihak perbankan.

Bank berfungsi sebagai penerima dana, artinya bank menerima uang serta dana – dana lainnya dari masyarakat yang dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Bank juga berfungsi sebagai pemberi kredit, artinya bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, dan kredit ini bisa disalurkan ke dalam bentuk kredit produktif, kredit konsumtif, dan lain sebagainya. Hal inilah yang disebut dengan *intermediary function*, dimana bank berperan sebagai lembaga yang mengumpulkan *idle money*, untuk disalurkan sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada pemiliknya, dalam bentuk bunga (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 68).

Usaha untuk menghimpun DPK ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemberian kredit kepada pihak yang membutuhkan. Karena peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 68). Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank memiliki kelebihan dana sehingga laba yang diperoleh pun tidak akan bertambah (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 69).

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 7) mengemukakan bahwa :

Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk – produk / jasa – jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Produk atau jasa – jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

Selain itu manfaat kredit bagi masyarakat luas menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004: 9) adalah :

Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.

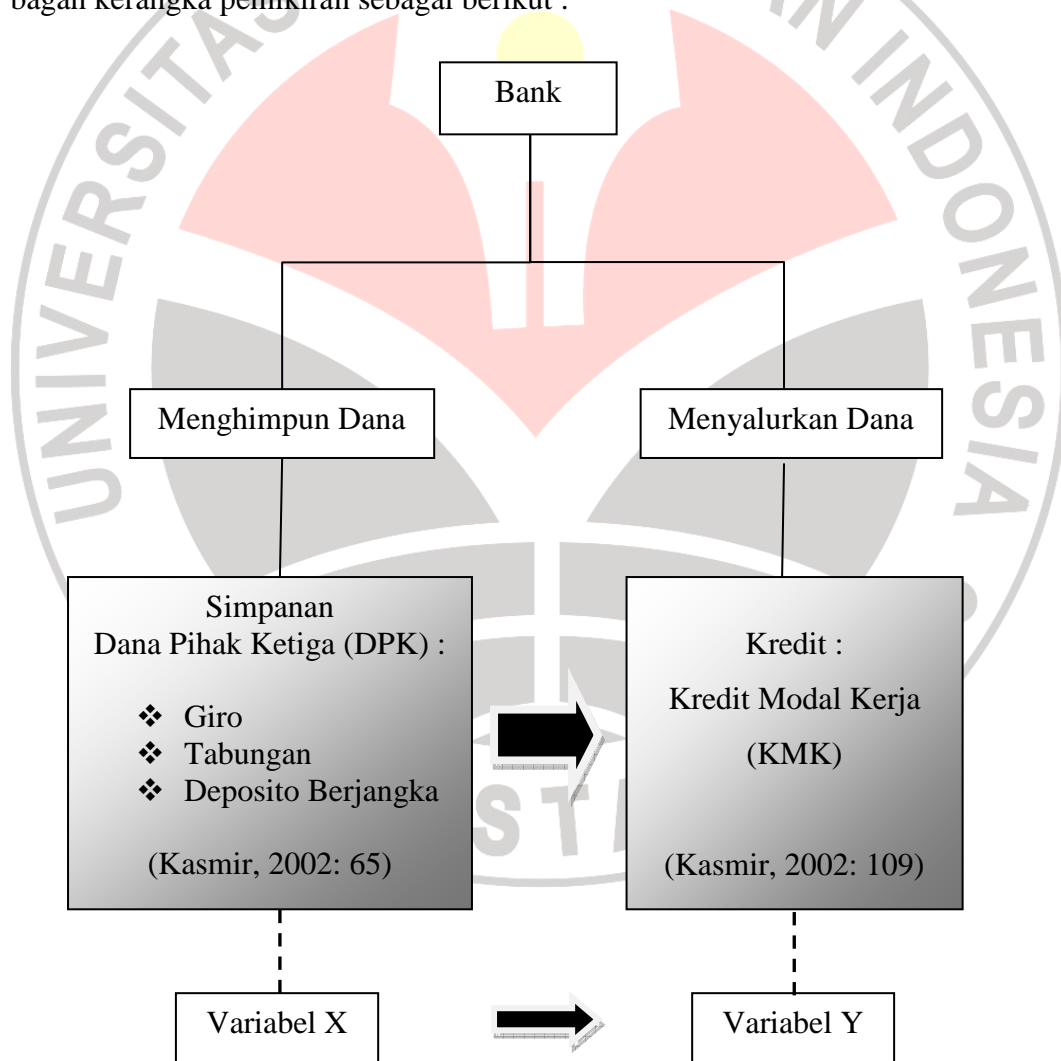
Pernyataan Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah simpanan DPK pada bank akan meningkatkan pemberian kredit kepada masyarakat, salah satunya untuk kredit modal kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Idham Kusmantara (2004) pada PT. Bank Jabar Cabang Subang menunjukkan bahwa perubahan simpanan DPK yang diwakili oleh giro, tabungan, dan deposito berjangka secara bersama – sama mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap perubahan kredit konsumtif. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ricky B.W (2007) pada Bank Jabar menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara pertumbuhan simpanan DPK dengan pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan. Kedua penelitian di atas menunjukkan perbedaan pada hasil penelitian.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbankan menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dengan cara menghimpun dana dari masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito berjangka. Serta melakukan kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit, salah satunya yaitu kredit modal kerja.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002: 68) mengemukakan dua fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran, penulis menggambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 5.1 Kerangka Pemikiran

1.5.2 Hipotesis

Riduwan (2006: 37) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut : “Jawaban sementara terhadap rumus-rumus masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasaan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya”. Sementara Sugiyono (2006: 51) mendefinisikan hipotesis sebagai : “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Terdapat hubungan yang positif antara Simpanan dana pihak ketiga dengan pemberian kredit modal kerja.”

